

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor yang berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi faktor penunjang bagi berbagai dimensi pembangunan (Muhlis & Windiasari, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan melalui implementasi berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Jalan Tol Trans Jawa, Moda Raya Terpadu (MRT), dan pembangunan pelabuhan. Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan efisiensi sistem logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. (Nadziliyah & Primasari, 2022). Ketersediaan infrastruktur yang memadai diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional, namun terjadinya tekanan ekonomi pascapandemi COVID-19 telah memberikan tantangan besar yang secara signifikan mempengaruhi kinerja operasional dan stabilitas finansial perusahaan-perusahaan di sektor infrastruktur (Handoko et al., 2022; Haryadi et al., 2026; Muhlis & Windiasari, 2023).

Karakteristik industri infrastruktur memiliki kompleksitas tinggi yang membuatnya rentan terhadap risiko manipulasi laporan keuangan, terutama karena keterlibatan dalam proyek bernilai sangat besar dan investasi jangka panjang

(Lailatuddzikriyyah, 2021). Sektor ini memiliki struktur pendanaan yang kompleks dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada pinjaman bank, penerbitan obligasi, serta kucuran investasi pemerintah (Lailatuddzikriyyah, 2021). Selain itu, mekanisme pengakuan pendapatan dalam kontrak tidak selalu sederhana karena sifat proyeknya yang kontraktual dan berdurasi lama, ditambah dengan adanya perubahan standar akuntansi seperti PSAK 115 yang berdampak pada kualitas informasi laba (Haryadi et al., 2026). Kondisi inilah yang seringkali menjadi celah terjadinya ketidaksesuaian dalam penyusunan pelaporan keuangan (Haryadi et al., 2026; Nadziliyah & Primasari, 2022).

Kasus ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan yang paling menonjol pada periode 2022–2024 adalah kasus pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, di mana ditemukan rekayasa penyajian laporan keuangan untuk menutupi beban utang proyek infrastruktur dan gambaran kondisi keuangan yang sebenarnya (Siregar, 2023). Berdasarkan laporan media nasional, terdapat indikasi bahwa manajemen perusahaan melakukan rekayasa atas pelaporan utang dan kinerja keuangan untuk mencerminkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi riil sehingga memunculkan dugaan manipulasi laporan keuangan yang berpotensi menyesatkan para pemangku kepentingan (Siregar, 2023). Selanjutnya, audit investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diselesaikan pada akhir 2023 menguatkan temuan awal tersebut dengan menyimpulkan bahwa terdapat bukti praktik manipulasi laporan keuangan dalam periode beberapa tahun sebelumnya yang kemudian hasilnya diserahkan kepada kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tindak lanjut penanganan (Rahman, 2024). Praktik

manipulatif ini menunjukkan bahwa elemen-elemen dalam *fraud* heptagon, salah satunya tekanan, untuk menyajikan laporan keuangan yang tampak stabil di tengah kesulitan likuiditas (Chandra, 2025; Christian et al., 2023).

Sebagai salah satu sarana pelaporan perusahaan, laporan keuangan berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, hasil kinerja, dan arus kas kepada para pemangku kepentingan eksternal. (Sihombing, 2022). Pada sektor infrastruktur, laporan keuangan yang transparan menjadi fondasi dasar bagi penilaian efisiensi proyek dan evaluasi kesehatan finansial entitas (Jodyan et al., 2024). Informasi yang akurat di dalamnya sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan terkait kelayakan pendanaan serta dalam membangun dan menjaga kepercayaan investor di pasar modal (Lailatuddzikriyyah, 2021; Nugraha & Nugraheni, 2025)

Kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi dasar bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Investor dan pemegang saham menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi, sedangkan kreditor memanfaatkan informasi tersebut untuk mengevaluasi tingkat risiko sebelum menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan (Nugraha & Nugraheni, 2025). Di sisi lain, pemerintah melalui otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkepentingan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pajak,

sedangkan publik mengharapkan akuntabilitas atas proyek-proyek yang melibatkan dana atau fasilitas negara (Jodyan et al., 2024).

Berbagai tekanan yang muncul dalam lingkungan bisnis dapat meningkatkan dorongan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Tekanan tersebut umumnya berasal dari kewajiban memenuhi target kinerja perusahaan serta harapan investor terhadap pencapaian pertumbuhan laba yang konsisten dari waktu ke waktu. (Irman et al., 2023; Ratmono et al., 2020; Setyono et al., 2023). Tekanan dari pasar modal agar harga saham tetap stabil juga seringkali memicu manajemen mengambil tindakan oportunistik demi memberikan kesan bahwa kondisi finansial perusahaan selalu dalam keadaan baik (Deniswara et al., 2022; Setyono et al., 2023). Fenomena ini mengakibatkan munculnya berbagai praktik menyimpang seperti *earnings management* untuk mengatur fluktuasi laba, *window dressing* untuk mempercantik tampilan neraca, hingga tindakan *financial statement manipulation* yang melanggar prinsip akuntansi (Lailatuddzikriyyah, 2021; Pamungkas & Irwandi, 2025).

Kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai salah saji atau penghilangan jumlah secara sengaja dalam laporan keuangan dengan maksud menipu para penggunanya (Jodyan et al., 2024). Kecurangan ini memberikan dampak sistemik, termasuk kerugian finansial yang masif, kerusakan reputasi, hingga penurunan tingkat kepercayaan di pasar modal secara keseluruhan (Jodyan et al., 2024). Mengingat besarnya nilai transaksi dan penggunaan estimasi akrual

yang tinggi, manipulasi laporan keuangan menjadi masalah yang sangat relevan dan berisiko tinggi di sektor infrastruktur (Rahardyan et al., 2025).

Teori yang menjelaskan pendorong *fraud* telah berevolusi dari *Fraud Triangle* (tekanan, peluang, rasionalisasi) oleh (Cressey, 1953) berkembang menjadi *Fraud Diamond* dengan tambahan *capability* (Wolfe & Hermanson, 2004) dan *Fraud Pentagon* yang menyertakan *Arrogance* (Horwath, 2011). Evolusi terbaru adalah *Fraud Heptagon* yang menambahkan elemen *Ignorance* dan *Greed* (Handoko et al., 2022). *Fraud Heptagon* merupakan model yang paling komprehensif dalam mendeteksi kecurangan saat ini karena mencakup tujuh dimensi pendorong yang lebih luas dibandingkan model-model sebelumnya (Jodyan et al., 2024; Pamungkas & Irwandi, 2025).

Dimensi pertama dalam *fraud Heptagon* adalah *pressure* (tekanan) yang didefinisikan sebagai dorongan atau insentif yang membuat seseorang merasa perlu melakukan tindakan curang, baik karena kebutuhan finansial, tekanan target yang tinggi, maupun pembuktian diri untuk mengalahkan sistem (Kurniarin, 2023; Pamungkas & Irwandi, 2025). Di sektor infrastruktur, tekanan ini menjadi sangat relevan ketika perusahaan menghadapi ancaman terhadap stabilitas keuangan atau tuntutan untuk mencapai target laba demi menarik investor dan kreditor (Lailatuddzikriyyah, 2021). Proksi variabel ini sering kali menggunakan *financial stability* (ACHANGE) (Nugraha & Nugraheni, 2025). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa stabilitas keuangan (ACHANGE) berpengaruh positif signifikan (Chandra, 2025; Haqq & Budiwitjaksono, 2020; Jodyan et al., 2024;

Kurniarin, 2023; Lailatuddzikriyyah, 2021; Yusrianti et al., 2020) terhadap kecurangan laporan keuangan sedangkan pada penelitian lainnya menunjukkan hasil negatif signifikan (Handoko et al., 2022; Pamungkas & Irwandi, 2025; Setyono et al., 2023).

Dimensi kedua dalam *fraud* heptagon adalah *opportunity* (peluang) yang merujuk pada situasi atau keadaan yang memungkinkan terjadinya penipuan karena lemahnya sistem pengawasan internal atau kurangnya efektivitas pengawasan eksternal (Nugraha & Nugraheni, 2025). Karakteristik industri infrastruktur yang kompleks dan melibatkan banyak estimasi akuntansi sering kali dimanfaatkan jika terdapat celah dalam struktur dewan komisaris (Lailatuddzikriyyah, 2021). Proksi untuk variabel ini umumnya menggunakan *monitoring effectiveness* (BDOUT) yang diukur melalui rasio jumlah dewan komisaris independen (Jodyan et al., 2024). Penelitian terdahulu menemukan bahwa *monitoring effectiveness* tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan yang mengindikasikan bahwa jumlah komisaris independen saja belum menjamin efektivitas pengawasan (Haqq & Budiwitjaksono, 2020; Lailatuddzikriyyah, 2021; Setyono et al., 2023). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak efektif berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan *fraud* (Jodyan et al., 2024) sedangkan pada penelitian (Chandra, 2025) menunjukkan hasil positif signifikan.

Dimensi ketiga dalam *fraud* Heptagon adalah *rationalization* (rasionalisasi) yang merujuk pada tindakan pelaku mencari pembenaran atas tindakan menyimpang mereka, menganggapnya sebagai hal yang wajar atau benar demi

kepentingan perusahaan (Jodyan et al., 2024). Di sektor infrastruktur, rasionalisasi relevan saat perusahaan melakukan upaya untuk menghapus jejak kecurangan periode sebelumnya, seperti melalui pergantian auditor eksternal (Handoko et al., 2022). Variabel ini umumnya diproksikan dengan *Change in Auditor* (CIA) (Narsa et al., 2023). Penelitian terdahulu memberikan temuan bahwa variabel CIA berpengaruh positif signifikan (Chandra, 2025; Narsa et al., 2023; Nugraha & Nugraheni, 2025; Setyono et al., 2023) dan negatif signifikan (Handoko et al., 2022; Pamungkas & Irwandi, 2025). Penelitian lainnya menunjukkan hasil CIA tidak berpengaruh signifikan (Haqq & Budiwitjaksono, 2020; Jodyan et al., 2024).

Dimensi keempat dalam *fraud* heptagon adalah *capability* (kemampuan) yang merujuk pada sifat dan keterampilan individu, seperti posisi atau kekuasaan, yang memungkinkan mereka mengeksekusi penipuan dan mengatasi kontrol internal (Jodyan et al., 2024; Lailatuddzikriyyah, 2021; Nugraha & Nugraheni, 2025). Di industri infrastruktur, kapabilitas ini sangat krusial saat pimpinan menggunakan wewenangnya untuk mengganti struktur direksi demi memuluskan rencana manipulasi atau menutupi jejak kecurangan (Lailatuddzikriyyah, 2021). Proksi variabel ini menggunakan *Change in Directors* (CID) (Nugraha & Nugraheni, 2025). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Change in Directors* (CID) tidak berpengaruh signifikan (Chandra, 2025; Handoko et al., 2022; Haqq & Budiwitjaksono, 2020; Jodyan et al., 2024; Lailatuddzikriyyah, 2021; Pamungkas & Irwandi, 2025; Setyono et al., 2023) sedangkan pada penelitian (Yustikasari & Sari, 2024) menunjukkan hasil positif signifikan.

Dimensi kelima dalam *fraud* heptagon adalah *arrogance* (arogansi) ditandai dengan rasa superioritas dan rasa percaya diri berlebihan dari pimpinan perusahaan yang merasa dirinya kebal terhadap aturan atau pengendalian internal (Jodyan et al., 2024; Lailatuddzikriyyah, 2021). Hal ini sering tercermin dari sikap pimpinan yang mendominasi dan ingin dikenal secara publik melalui dokumentasi laporan tahunan (Lailatuddzikriyyah, 2021). Variabel ini diproksikan dengan *Frequent Number of CEO's Picture* (Jodyan et al., 2024). Penelitian terdahulu menemukan bahwa arogansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Haqq & Budiwitjaksono, 2020) sedangkan pada penelitian lain memiliki tidak berpengaruh signifikan karena keberadaan foto tersebut lebih dianggap sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab pimpinan kepada investor (Jodyan et al., 2024; Lailatuddzikriyyah, 2021; Pamungkas & Irwandi, 2025; Setyono et al., 2023).

Dimensi keenam dalam *fraud* Heptagon adalah *ignorance* (ketidaktahuan) mengacu pada situasi di mana individu kurang memahami risiko, peraturan, atau standar tata kelola, namun tetap bertindak berdasarkan asumsi yang salah (Jodyan et al., 2024; Pamungkas & Irwandi, 2025). Dalam konteks perusahaan infrastruktur, ketidaktahuan atas prinsip *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang kompleks atau kurangnya pelatihan tata kelola dapat memicu kesalahan penyajian material dalam pelaporan keuangan (Jodyan et al., 2024; Pamungkas & Irwandi, 2025). Proksi variabel ini adalah *corporate governance course* atau pemberian pelatihan tata kelola bagi dewan direksi (Handoko et al., 2022). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *ignorance* tidak berpengaruh signifikan

dalam pendeteksian *fraud*, di mana pemberian pelatihan atau kursus tata kelola tidak selalu berhasil mengurangi tindakan kecurangan jika tidak diiringi dengan integritas (Handoko et al., 2022; Jodyan et al., 2024; Pamungkas & Irwandi, 2025). Mekanisme tata kelola yang kuat hanya terbukti mampu memitigasi pengaruh ketidaktahuan terhadap tindakan *fraud* pada sampel tertentu (Pamungkas & Irwandi, 2025).

Dimensi ketujuh dalam *fraud* Heptagon adalah *greed* (keserakahan) didefinisikan sebagai sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dan selalu menginginkan kekayaan lebih demi memenuhi gaya hidup melampaui kemampuan finansialnya (Handoko et al., 2022; Jodyan et al., 2024; Lailatuddzikriyyah, 2021; Pamungkas & Irwandi, 2025). Relevansi di sektor infrastruktur muncul ketika manajer berupaya memaksimalkan imbalan pribadi melalui manipulasi target pendapatan guna mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi (Jodyan et al., 2024). Proksi variabel ini menggunakan remunerasi pimpinan perusahaan (Handoko et al., 2022). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *greed* memiliki dampak tidak signifikan terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan yang berarti remunerasi tinggi tidak secara otomatis memicu *fraud* (Handoko et al., 2022; Jodyan et al., 2024; Pamungkas & Irwandi, 2025) sedangkan pada penelitian Soepriyanto et al. (2022) menunjukkan hasil positif signifikan.

Masalah utama dalam upaya pencegahan kecurangan adalah praktik manipulasi laporan keuangan yang sangat sulit dideteksi secara manual oleh auditor maupun pemangku kepentingan karena sering kali disembunyikan dengan sengaja

melalui rangkaian penyajian data yang menyesatkan (Nadziliyah & Primasari, 2022; Tarjo et al., 2022). Tindakan *fraud* sering kali tersembunyi di balik manipulasi catatan akuntansi atau dokumen pendukung untuk memberikan kesan bahwa kinerja perusahaan tetap dalam kondisi baik (Lailatuddzikriyyah, 2021). Kondisi ini menyebabkan pendeteksian kecurangan tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan angka kasar sehingga diperlukan alat analisis kuantitatif yang mampu memberikan sinyal peringatan dini (*red flags*) secara lebih objektif dan akurat (Haryadi et al., 2026; Marais et al., 2023; Yustikasari & Sari, 2024).

Salah satu instrumen analisis yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah Dechow F-Score, sebuah model penilaian risiko kecurangan yang diperkenalkan oleh Dechow pada tahun 2011 sebagai penyempurnaan dari model-model sebelumnya (Dechow, 2000). Model ini merupakan model berbasis analisis kualitas akrual (RSST) dan kinerja keuangan yang dirancang khusus untuk memprediksi probabilitas terjadinya salah saji material (Haqq & Budiwitjaksono, 2020; Haryadi et al., 2026; Nadziliyah & Primasari, 2022). Penggunaan model ini dianggap sangat mampu mengidentifikasi indikasi *financial statement manipulation* karena memiliki kemampuan prediksi yang lebih tinggi dalam menangkap anomali laporan keuangan pada perusahaan yang berisiko melakukan kecurangan akuntansi (Adi & Viriany, 2025).

Instrumen pendeteksian yang telah berkembang belum mampu menutup adanya gap penelitian yang signifikan, di mana kerangka teori *fraud* heptagon yang mencakup dimensi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi

(*rationalization*), kapabilitas (*capability*), arogansi (*arrogance*), ketidaktahuan (*ignorance*), dan keserakahan (*greed*), masih sangat jarang digunakan dalam penelitian *fraud* di Indonesia (Chandra, 2025). Selain itu, penelitian *fraud* pada sektor infrastruktur di Indonesia masih terbatas padahal sektor ini memiliki karakteristik unik yang rentan terhadap penyimpangan laporan keuangan (Haryadi et al., 2026). Terlebih lagi, penggunaan Dechow F-Score pada sektor ini masih jarang dilakukan dibandingkan penggunaan model deteksi lain sehingga penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengisi celah literatur tersebut (Haryadi et al., 2026; Tarjo et al., 2022).

Penelitian ini memfokuskan pengamatan pada periode 2022–2024 yang merupakan periode pascapandemi COVID-19. Periode tersebut mencerminkan kondisi ekonomi masih berfluktuasi dan memberikan dampak signifikan terhadap operasional perusahaan (Handoko et al., 2022; Haryadi et al., 2026). Pada rentang tahun tersebut, banyak proyek infrastruktur nasional yang sedang berjalan, namun di saat yang sama perusahaan menghadapi tekanan kinerja yang besar untuk memenuhi ekspektasi pasar dan memulihkan stabilitas finansial (Nadziliyah & Primasari, 2022). Perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI dipilih sebagai objek karena signifikansinya dalam pembangunan nasional serta kewajiban transparansi publiknya yang memungkinkan analisis data sekunder secara mendalam dan terverifikasi (Chandra, 2025). Urgensi untuk memitigasi dampak sistemik dari kecurangan laporan keuangan dan dikombinasikan dengan pengujian model deteksi yang akurat, menjadi dasar kuat dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul

"PENGARUH *FRAUD* HEPTAGON TERHADAP FINANCIAL STATEMENT MANIPULATION DENGAN MODEL DECHOW PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR PERIODE 2022–2024".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *pressure* berpengaruh terhadap *financial statements manipulation* pada perusahaan infrastruktur periode 2022-2024?
2. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap *financial statements manipulation* pada perusahaan infrastruktur periode 2022-2024?
3. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap *financial statements manipulation* pada perusahaan infrastruktur periode 2022-2024?
4. Apakah *capability* berpengaruh terhadap *financial statements manipulation* pada perusahaan infrastruktur periode 2022-2024?
5. Apakah *arrogance* berpengaruh terhadap *financial statements manipulation* pada perusahaan infrastruktur periode 2022-2024?
6. Apakah *ignorance* berpengaruh terhadap *financial statements manipulation* pada perusahaan infrastruktur periode 2022-2024?
7. Apakah *greed* berpengaruh terhadap *financial statements manipulation* pada perusahaan infrastruktur periode 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis aspek *pressure* terhadap *financial statements manipulation*
2. Menganalisis aspek *opportunity* terhadap *financial statements manipulation*

3. Menganalisis aspek *rationalization* terhadap *financial statements manipulation*
4. Menganalisis aspek *capability* terhadap *financial statements manipulation*
5. Menganalisis aspek *arrogance* terhadap *financial statements manipulation*
6. Menganalisis aspek *ignorance* terhadap *financial statements manipulation*
7. Menganalisis aspek *greed* terhadap *financial statements manipulation*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan dan analisis ketujuh aspek *Fraud Heptagon* (*Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability, Arrogance, Ignorance, Greed*) dalam konteks manipulasi laporan keuangan serta penguasaan teknis atas model kuantitatif, yaitu Dechow F-Score, untuk mendeteksi kecurangan
2. Bagi perkembangan ilmu akuntansi dan auditing, penelitian ini membantu memperkaya literatur dengan menggabungkan teori perilaku (*Fraud Heptagon*) dengan model deteksi statistik sehingga memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dalam memahami fenomena kecurangan dalam laporan keuangan.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait efektivitas model deteksi *fraud*,

pengembangan teori *Fraud* Heptagon, atau replikasi studi pada sektor industri lainnya dengan periode berbeda

4. Bagi penelitian selanjutnya, studi ini memberikan fondasi metodologis dan temuan menggunakan model Dechow yang dapat dieksplorasi lebih mendalam dengan menambah variabel, model lain atau memperluas cakupan sampel penelitian

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini mengasah kemampuan penggunaan dua model pendeteksi kecurangan laporan keuangan dan pemahaman mengenai penerapan *fraud* heptagon dalam *fraudulent financial statements*
2. Bagi investor dan kreditor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bantu (*red flag*) dalam proses pengambilan keputusan investasi/pembiayaan, khususnya untuk perusahaan sektor infrastruktur, dengan memahami faktor-faktor pemicu *fraud* dan keakuratan model deteksinya
3. Bagi auditor internal dan eksternal, penelitian ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif (Heptagon) untuk menilai risiko *fraud* serta panduan praktis dalam memilih dan menggunakan model analitis Dechow F-Score sebagai prosedur tambahan dalam audit laporan keuangan
4. Bagi regulator dan penyusun standar, temuan mengenai aspek *fraud* heptagon serta efektivitas model deteksi dapat menjadi

bahan pertimbangan untuk menyempurnakan regulasi pengawasan dan tata kelola perusahaan serta aturan pelaporan keuangan di sektor infrastruktur

5. Bagi manajemen perusahaan sektor infrastruktur, penelitian ini dapat berfungsi untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem pengendalian internal serta budaya organisasi guna memitigasi faktor-faktor penyebab *fraud*